

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Evaluasi penerapan *e-government* oleh Dinas Dukcapil Kota Jambi melalui Aplikasi sipduko secara garis besar sudah baik karena telah membantu mempercepat pelayanan pengurusan administrasi kependudukan masyarakat Kota Jambi, namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dan harus dioptimalkan kedepannya. Dengan menggunakan evaluasi kematangan *e-government* yang dikemukakan oleh Fietkiwitz et.al (2017) melalui 5 pilar model *e-government* (*information dissemination, communication, interoperability, transaction dan participation*). Dengan hasil penelitian dimana terdapat 3 pilar yang belum matang dalam penyelenggaraannya yaitu *information dissemination, communication dan participation* dan dua pilar lainnya dikategorikan kematangan *e-government* telah baik yaitu *interoperability dan transaction*, sebagai berikut:

1. Pilar *information dissemination*, dimana pada tampilan aplikasi sipaduko sederhana dan praktis yang lebih ditujukan untuk digunakan kepada kaum anak muda yang lebih ahli dalam mengeksplor, maka dari itu tidak seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan aplikasi.
2. Pilar *communiation*, aplikasi sipaduko belum memiliki tautan maupun akun media sosial tersendiri yang dapat berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait layanan *e-government* pada aplikasi siaduko, namun telah memiliki fitur hubungi operator melalui whatsapp.
3. Pada pilar *participation*, aplikasi sipaduko tidak memiliki fitur yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses perkembangan sistem aplikasi.

4. Pada pilar *transaction* telah menghadirkan fitur transaksi data baik pengisian formulir, pemberian data, pengaksesan informasi layanan dapat dilakukan secara optimal pada aplikasi sipaduko. Hal tersebut sangat baik dan sesuai dengan konsep *e-government*.

5. Pada pilar *interoperability*, dimana hubungan integrasi pihak Dinas Dukcapil Kota Jambi telah melakukan integrasi yang baik dengan beberapa instansi lain terkait yang berhubungan dengan data adminduk, seperti Puskesmas, Rumah Sakit, KUA dan Gereja, dengan terjalannya integrasi tersebut, pelaksanaan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mewujudkan konsep *Good Governance* melalui layanan *e-government* pada aplikasi sipaduko.

Dalam bentuk perkembangan model kematangan *e-Government*, peneliti menyadari teori yang digunakan pada penelitian ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri. Adapun kelebihan pada penggunaan teori oleh Fietkiwitz et.al dalam 5 pilar evaluasi *e-Government* ialah terletak variabel pada teori ini mampu menganalisis secara bertahap terkait perkembangan suatu sistem aplikasi, hal ini dapat menjadi pedoman pelaku sistem aplikasi dalam melihat kematangan aplikasi dapat diselenggarakan ke publik. Selanjutnya dimana ada kelebihan tentu ada kekurangan, yaitu karena teori ini hanya fokus pada tahapan-tahapan perkembangan suatu sistem aplikasi, maka dari itu tidak terlihat aspek-aspek lainnya, seperti Sumber Daya Manusia (SDM)/pelaku, organisasi serta aspek pengawasan, sehingga menjadi permasalahan penelitian dikarenakan keterbatasan teori tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan Dinas Dukcapil Kota Jambi terkait penyelenggaraan *e-government* melalui aplikasi sipaduko:

1. Mengembangkan layanan aplikasi, seperti menambahkan fitur langkah menggunakan layanan aplikasi, yang memungkinkan aplikasi tersebut ramah digunakan terutama pada orangtua, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pemanfaatan *e-government*.
2. Mengembangkan layanan aplikasi, seperti menambahkan fitur penilaian pengguna aplikasi, sehingga tercapai *e-democracy* yang memungkinkan masyarakat dapat menyampaikan pendapat, saran maupun kritikan secara *online*.
3. Meningkatkan pengadaan infrastruktur TIK yang berkualitas, sehingga pemanfaatan pengembangan *e-government* dalam mendukung konsep *Good Governance* tidak terhambat.
4. Meningkatkan sosialisasi tentang adanya pelayanan *e-government* melalui aplikasi sipaduko ini dalam pengurusan administrasi kependudukan terlaksana secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dapat meningkatkan cakupan masyarakat yang mengetahui layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara *online*.

